

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR CIKATOMAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Oleh:

**NURSALIM**

**Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Galuh Ciamis  
*Coimnoersalim@gmail.com***

## ABSTRAK

*Penelitian yang dilakukan di Pasar Cikatomas tentang implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas sebagai pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menjadi penunjang pendapatan asli daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan unit analisis yaitu unit pelaksana teknis pasar cikatomas. Informan yang dipilih adalah mempunyai relevansi yang dibutuhkan penelitian terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas, Kasubbag TU Unit pelaksana teknis Pasar Cikatomas, Petugas Pemungut retribusi, dan pedagang pasar cikatomas. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif analisis yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian terkait Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas dapat diketahui bahwa 1) implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar cikatomas telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan pelaksanaannya. 2) hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan diantaranya adalah para pedagang yang belum sadar akan kewajibannya juga dari sumber daya pelaksana yang kurang berkompeten, hal ini menunjukkan belum maksimal, dimana kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum belum mencapai target retribusi yang telah ditentukan. 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tentang retribusi pasar di pasar cikatomas diantaranya adalah pihak UPT pasar cikatomas yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pemberian arahan kepada para pedagang tentang adanya pemungutan retribusi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, Struktur birokrasi.*

**Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan Retribusi Pasar**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Suatu daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan bahwa :

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/ DAK), Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan kepada setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. retribusi pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK atau retribusi-retribusi yang lainnya.

Sama seperti daerah lain Pasar Cikatomas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan sumber potensial daerah. mengingat Pasar Cikatomas merupakan salah satu dari 5 (lima) pasar yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tepatnya berada di Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya menurut aturan pemerintah merupakan pasar tipe A yang bukanya harus setiap hari, tetapi dikarenakan berbagai hal alasan para pedagang dan berpindah-pindahnya para Pedagang ke Pasar lain yang berdagang di Pasar Cikatomas ini maka Pasar Cikatomas hanya buka setiap senin dan kamis dan ada juga beberapa kios yang buka setiap hari. Pasar Cikatomas dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dilaksanakan oleh UPT Pasar Cikatomas merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya Pasar Cikatomas ini pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik terutama dari sisi retribusi pasar yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi pengelola Pasar Cikatomas sebagai Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan Pendaptan Asli Daerah (PAD) dan dituntut untuk dapat membuat atau mengembangkan dan melaksanakan implementasi kebijakan pemungutan retribusi.

Namun, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Cikatomas terlihat bahwa Implementasi Kebijakan tentang Pemungutan Retribusi pasar oleh UPT Pasar Cikatomas masih belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Target pemasukan retribusi sebesar Rp. 137.000.000,-/tahun pada Tahun 2017 yang dimulai pada Bulan Juli-Desember hanya terealisasi 57% yaitu sebesar Rp.78.090.000,-. Dan pada Bulan Januari-Juni Tahun 2017 belum dilakukan pemungutan retribusi pasar

dikarenakan masih dalam tahap relokasi dan penempatan para pedagang di Pasar Cikatomas yang masih baru.

2. Kurang tegasnya para petugas pemungut retribusi yang dimiliki UPT Pasar Cikatomas dalam memungut tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pemungutan retribusi dilakukan setiap hari kepada pedagang yang buka setiap hari dan sebagian di hari pasar yaitu hari senin dan kamis saat semua pedagang membuka kiosnya, sehingga mengakibatkan penarikan retribusi tidak maksimal. Petugas yang menarik retribusi sering kecolongan oleh sikap pedagang yang tidak membayar retribusi pada hari itu sehingga para pedagang menunggak pembayaran retribusi.
3. Kurangnya komunikasi antara petugas pemungut retribusi dengan para pedagang/wajib retribusi sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi pedagang dalam membayar retribusi pasar masih rendah. Contohnya : para pemungut retribusi kurang menekankan kapan jatuh tempo pembayaran retribusi.

Beberapa indikator kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar Cikatomas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui UPT Pasar Cikatomas sebagai pelaksana dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar secara efektif demi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat fokus permasalahan yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar oleh UPT Pasar Cikatomas ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas ?
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Implementasi

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu, suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu obyek, situasi atau proses tersebut serta bagaimana korelasi antara komponen-komponen tersebut. Namun demikian, sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akan dianalisis bagaimana proses implementasi program tingkat keberhasilannya. Dengan tingkat keberhasilan program tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi program. Demikian pula, jika ada hambatan yang mengurangi tingkat keberhasilan implementasi program tersebut, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tersebut.

Sehubungan dengan itu Aderson (Arifin Tahir, 2015 : 56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
2. Hakikat proses administrasi.
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Implementasi kebijakan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan - kebijaksanaan. Implementasi kebijakan / kebijaksanaan dapat juga dikatakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III (Arifin Tahir, 2015: 61) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

### 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak

jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia masih menganut *model continentalis*.

George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakannya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Komunikasi (ii) Sumber daya (iii) Disposisi (iv) Struktur birokrasi.

Variabel pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 137) terdapat indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Menurut George Edward III (Widodo, 2010 : 97) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III (Widodo, 2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III yang dirangkum (Winarno, 2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

“Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah ‘sumber daya’. Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 138), dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan

keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Efektifitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain , efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Menurut Edward III (Widodo, 2010 : 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III (Widodo, 2010 : 98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C Edward III(Leo Agustino, 2016 : 139) adalah :

Disposisi atau ‘Sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bisa.

Menurut Edward III(Agustino, 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 139) adalah:

- a. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 140) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 141) yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat standar operating procedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Edward III (Winarno, 2005:152) menjelaskan bahwa:

"SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

### 2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik (*goedhart*)(Adisasmita, 2011:109).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian menurut Rahardjo Adisasmita (2011 :110) dapat dikemukakan bahwa ciri pokok retribusi daerah adalah :

- a. Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- b. Pengenaan pemungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.

Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum :

Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan barang dan atau jasa fasilitas untuk tujuan kepentingan dan atau kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.

“Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar”.

“Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotong retribusi jasa umum”.

Menurut Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar :

“Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pemakaian/penggunaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah”.

“Pasar adalah pasar tradisional/sederhana yang dibangun, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah”.

Menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Nama Objek Dan Subjek Retribusi :

1. Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut biaya atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan atau oleh pemerintah daerah
2. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los,

kios, yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang

3. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan studi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti memberikan menggambarkan pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 informan yang terdiri atas 3 orang staf UPT Pasar Cikatomas terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas, Kasubbag TU Unit pelaksana teknis Pasar Cikatomas, Petugas Pemungut retribusi, dan 8 orang pedagang Pasar Cikatomas

Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasikan, penyelidikan dengan teknik survey, dengan teknik interview, angket, observasi atau dengan teknik test, studi kasus, studi komparative, studi waktu dan gerak analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atau mengkaji permasalahan melalui buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, dilakukan dengan cara:
  - 1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dilakukan dengan cara

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.

- 2) Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti dengan responden.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap informasi atau data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, langsung dianalisis.
- 2) Penganalisisan yang dilakukan setiap selesai pengumpulan data, diikuti dengan interpretasi untuk menemukan makna yang terkandung didalamnya.
- 3) Membuat kategorisasi dari unit-unit data dan mengklasifikasi data, sehingga data mentah yang terkumpul dapat ditransformasikan dengan sistematis menjadi unit-unit yang dipisahkan menurut karakteristiknya. Disini di buat batas-batas setiap unit untuk keperluan analisis berikut. Proses unitasi ini dilakukan bukan saja setelah data terkumpul semua akan tetapi dilakukan pula selama proses pengumpulan data.
- 4) Mengadakan member check sebagai sumber utama informasi (data) dalam penelitian ini. Kegiatan member check ini penulis lakukan setiap selesai mengadakan observasi dan wawancara responden. Sedangkan member check terakhir dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara keseluruhan.
- 5) Mengadakan diskusi dalam usaha menguji validitas-data yang terkumpul.
- 6) Memberikan tafsiran sebagai usaha menemukan makna yang terkandung dan diperoleh dalam penelitian ini.

### 3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu enam bulan, terhitung mulai bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna untuk memudahkan pengukuran fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan fokus kajian dalam pengimplementasian kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar dengan aspek kajian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III (Leo

Agustino, 2016 : 136) adalah meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Komunikasi, dengan indikator-indikator :
  - a. Pemerintah dan pihak UPT Pasar Cikatomas memberikan arahan dan sosialisasi kepada para pedagang dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar;
  - b. UPT Pasar Cikatomas selaku pengelola Pasar Cikatomas memberikan perintah kepada semua wajib retribusi untuk mentaati kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar;
  - c. Kepala UPT memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten kepada pelaksana supaya dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan;
2. Sumber daya, dengan indikator-indikator :
  - a. Tersedianya staf yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan;
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan;
  - c. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan;
  - d. Tersedianya waktu yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana, dengan indikator-indikator :
  - a. Bersikap tegas dalam mengimplementasikan kebijakan;
  - b. Adanya semangat pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar;
4. Struktur birokrasi, dengan indikator-indikator :
  - a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan;
  - b. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan;

### 4.1 Pembahasan Tentang Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan, maka dilakukan pembahasan mengenai Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi Pasar Di Pasar Cikatomas dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

pembahasan dari dimensi yang mendukung terhadap implementasi kebijakan sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam wajib retribusi.

Dengan demikian, bahwa dimensi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan kunci dalam mensosialisasikan tentang adanya pemungutan retribusi kepada para pedagang.

### **2. Sumber Daya**

Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada Pasar Cikatomas berjalan dengan baik.

Dengan demikian bahwa dimensi sumber daya merupakan kunci kedua dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyampaikan informasi adanya pemungutan retribusi pasar dan pelaksana kebijakan pemungutan retribusi di Pasar Cikatomas.

### **3. Disposisi Atau Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian bahwa dimensi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan

kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas.

### **4. Struktur Birokrasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang keempat yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan.

Oleh karena itu bahwa dimensi Struktur Birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar cikatomas para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan, selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus mengacu pada standar operasional prosedur dalam pengimplementasian kebijakan tersebut yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum.

#### **4.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengimplementasian Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas adalah sebagai berikut:

1. Hambatannya berasal dari kesadaran para pedagang yang masih kurang dan tidak mempunyai waktu luang untuk menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPT Pasar Cikatomas hal itu terlihat tidak semua pedagang yang menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh UPT pasar cikatomas,
2. Hambatan dalam pemberian perintah kepada semua wajib retribusi supaya mentaati kebijakan pemungutan retribusi pasar pedagang belum sadar akan kewajibannya membayar retribusi pasar hal itu terlihat masih banyak pedagang yang beralasan ketika di tarik retribusi Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pengoperasian

sistem, contohnya jaringan internet yang kadang tidak stabil

3. Kesiapan sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai arahan yang diberikan oleh kepala UPT Pasar Cikatomas hal itu terlihat masih banyaknya pedagang yang tidak memahami pentingnya pemungutan retribusi dengan tidak menghadiri pemberian arahan dan sosialisasi.
4. Penegakan sanksi bagi para pelanggar kebijakan yang belum bisa di terapkan.
5. Ketersediaan Staf UPT pasar cikatomas yang berkompeten, sarana prasarana yang memadai, anggaran dan waktu pelaksanaan kebijakan.
6. Pelaksanaan pemungutan kerja tidak dilakukan sesuai SOP oleh sebagian pelaksana kebijakan karena ribetnya pelaksanaan kebijakan sesuai standar operasional prosedur.

#### **4.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Cikatomas.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh unit pelaksana teknis Pasar Cikatomas dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan adalah terus menerus menghubungi dan mengunjungi para pedagang dan mensosialisasikan tentang pemungutan retribusi pasar ke pedagang.
2. Upaya yang dilakukan terus bersosialisasi dan mengunjungi pedagang supaya membayar retribusi.
3. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengajuan baik anggaran ataupun SDM ke Dinas juga dilakukan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ketersediaan waktu yang tepat diupayakan hari pasar selanjutnya yang tidak membayar harus bayar dan terus mendatangnya selagi belum membayar.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi kepada para pelanggan yang melanggar dengan memberi pengarahan supaya pedagang bisa mengerti dan tetap membayar retribusi juga dengan melakukan diskusi dengan pengelola pasar lain.
5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengimplementasian kebijakan sesuai prosedur para pegawai atau sumber daya manusia UPT Pasar Cikatomas kepala

memberi himbauan kepada para pegawai bahwa harus membiasakan dan mentaati standar operasional prosedur sesuai diperda retribusi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diberi judul Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan bahwa : implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas oleh UPT Pasar Cikatomas telah dilaksanakan, namun belum optimal sesuai dengan faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 136), yang terdiri dari: *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dan Struktur Birokrasi*. Hal ini dapat dilihat pada hal sebagai berikut :

- 1) Pencapaian realisasi target retribusi pasar pada Tahun 2017 dari Bulan Juli Sampai Dengan Desember 2017 mengalami penurunan dan sangat jauh dari target yang telah di tentukan pemerintah atau dinas terkait. Hal ini disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan tanpa melihat kondisi pasar yang ada.
- 2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas yaitu :
  - a. Komunikasi
  - b. Sumber daya
  - c. Disposisi atau sikap pelaksana
  - d. Struktur birokrasi

Diantara ke empat faktor di atas, faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pengimplementasian kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas.

1. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas yaitu masih banyaknya pedagang yang belum menyadari kewajiban mereka untuk membayar retribusi atau memahami sepenuhnya pentingnya kewajiban membayar retribusi pasar. Selain itu kendala lainnya yaitu UPT Pasar Cikatomas selaku pelaksana kebijakan itu sendiri yang belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai Peraturan Daerah tentang pemungutan retribusi. Selanjutnya juga kurang tegasnya para pelaksana kebijakan dalam menerapkan

sanksi kepada para pelanggar kebijakan tentang retribusi pasar.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan oleh pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas yaitu menghubungi dan mengunjungi para pedagang dan mensosialisasikan tentang pemungutan retribusi pasar ke pedagang, untuk mengatasi ketersediaan staf yang akan mengimplementasikan kebijakan secara terus menerus diajukan ke Dinas oleh UPT Pasar Cikatomas, selanjutnya melalui Kepala disampaikan himbauan kepada para pegawai bahwa harus membiasakan dan mentaati standar operasional prosedur sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.

### 5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan pemerintah, pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang adanya pemungutan retribusi kepada para pedagang pasar supaya lebih efektif dan efisien, maka perlu juga diperhatikan agar para pedagang / wajib retribusi bisa memahami pentingnya retribusi tersebut. Disamping itu pemerintah / para pelaksana juga harus memiliki ketegasan kepada para pedagang dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar terutama dalam penerapan sanksi bagi para pelanggar. Apabila pemerintah / para pelaksana memiliki ketegasan dalam prosesnya, secara tidak langsung para pedagang sebagai sasaran kebijakan akan mengikuti kebijakan tersebut. Kemudian untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten untuk mengimplementasikan kebijakan juga diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas para pelaksana kebijakan. Maka diharapkan dengan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan target retribusi pasar bisa terealisasi sesuai target yang telah ditentukan.
2. Supaya hambatan-hambatan dapat diminimalisir, maka disarankan :
  - 1) Staf/pegawai UPT Pasar Cikatomas memberikan himbauan kepada wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.
  - 2) Staf/pegawai Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas diharapkan bersikap tegas

dalam menerapkan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum.

- 3) Staf/pegawai UPT Pasar Cikatomas mensosialisasikan dengan terus menerus kepada para pedagang tentang pemungutan retribusi.
3. Supaya upaya-upaya yang dilakukan dapat menjadi sarana perbaikan bagi UPT Pasar Cikatomas dalam mengimplementasikan kebijakan maka peneliti sarankan dilakukan upaya lainnya yaitu :
  - 1) Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang dapat menunjang untuk mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar. Membangun sarana prasarana pasar yang lebih layak, agar masyarakat atau konsumen lebih nyaman berbelanja di pasar.
  - 2) Menggalakkan penyuluhan dan pertemuan terhadap pedagang pasar untuk meningkatkan kesadaran para pedagang akan pentingnya retribusi.
  - 3) Melakukan pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman para pegawai, agar para pegawai dapat lebih profesional dalam bekerja dan agar lebih menguasai lapangan dan menerapkan peraturan yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah..* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo.2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2005.*Pajak Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Uii Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.
- Tahir, Arifin.2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum*